



**Inklusi Keuangan
dalam
Persimpangan Kohesi Sosial
dan Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan**

Adhitya Wardhono ▲
Yulia Indrawati ▲
Clipis Gema Qorih ▲

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 8:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaan

Pasal 9:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan;
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

- (1) Setiap Orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Adhitya Wardhono
Yulia Indrawati
Ciplis Gema Qori'ah

Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Copyright © Agustus 2018

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Abadi. Hak moral atas buku ini dimiliki oleh Penulis. Hak ekonomi atas buku ini dimiliki oleh Penulis dan Penerbit sesuai dengan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis:

Adhitya Wardhono

Yulia Indrawati

Ciplis Gema Qori'ah

Desain Cover: Hermatwan Septian

Layout: Triana Novitasari

Diterbitkan Oleh:



Anggota IKAPI No. 185/JTI/2017

Perum Istana Tegal Besar Cluster Majapahit Blok P No.2

Jember, Jawa Timur, 68132

Email: redaksi@pustakaabadi.co.id

Website: www.pustakaabadi.co.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

14,5 x 21 cm ; xvi, 224 hlm;

ISBN 978-602-5570-21-6

PENGANTAR PENULIS

Buku dengan judul “Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi-Berkelanjutan” merupakan lanjutan dari buku edisi pertama yang telah terbit dengan judul “Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model”. Sub pokok bahasan pada buku kedua ini lebih menekankan pada urgensi inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi dengan beragam tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hal ini sejalan dengan dinamika teknologi informasi yang semakin tiada batas baik dalam dimensi ruang dan waktu.

Tematik inklusi keuangan telah menjadi bahasan menarik dan telah menjadi bagian dari program utama pembangunan di hampir seluruh negara di dunia dalam upaya pendalaman sistem keuangan secara merata pada seluruh strata masyarakat. Begitu halnya di Indonesia, tantangan terbesar implementasi inklusi keuangan yang memiliki karakteristik dan kohesi sosial berbeda baik secara geografi, demografi sosiologi dan budaya.

Secara khusus buku ini juga memberikan diskripsi inklusi dan literasi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan

memberikan wawasan baru dalam pengembangan dan penguatan inklusi dan literasi keuangan khususnya di Indonesia.

Jember, Agustus 2018
Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis | v

Daftar Isi | vii

Daftar Gambar | x

Daftar Tabel | xiii

Bab 1 KONSTELASI INKLUSI KEUANGAN GLOBAL | 1

1.1 Pendahuluan | 1

1.2 Definisi Inklusi Keuangan | 5

1.3 Beberapa Studi Empiris Inklusi Keuangan | 9

1.4 Perkembangan Inklusi Keuangan Global | 12

1.5 Perkembangan Inklusi Keuangan di Indonesia | 17

**Bab 2 INKLUSI KEUANGAN DAN KOHESI SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN | 28**

Bab 3 DINAMIKA SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA | 34

3.1 Sistem Keuangan di Indonesia | 34

3.2 Interaksi Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi | 42

3.3 Karakteristik Lembaga Keuangan di Indonesia | 45

3.4 Kedalaman Sistem Keuangan (*financial deepening*) | 48

3.5 Bank sebagai Financial Intermediaries | 52

3.6 Inklusi Keuangan Nasional | 59

Bab 4 MODEL INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA | 67

- 4.1 Branchless Banking | 68
- 4.2 Digitalisasi Keuangan (*Financial Technology*) | 74

Bab 5 STUDI INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH | 78

- 5.1 Sosial Demografis Responden | 79
 - 5.1.1 Sosial Demografis Responden Kabupaten Jember | 79
 - 5.1.2 Sosial Demografis Responden Kabupaten Bondowoso | 86
 - 5.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat | 90
 - 5.2.1 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Jember | 91
 - 5.2.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Bondowoso | 102
 - 5.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat | 114
 - 5.3.1 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember | 114
 - 5.3.2 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso | 118
 - 5.3.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso | 122
- Apendix | 127**

Bab 6 STUDI LITERASI KEUANGAN DI DAERAH | 130

- 6.1 Studi Literasi Keuangan di Kabupaten Jember | 132
 - 6.1.1 *Basic Financial Literacy* Kabupaten Jember | 140
 - 6.1.2 *Advanced Financial Literacy* di Kabupaten Jember | 144
 - 6.1.3 Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember | 147
- 6.2 Studi Literasi Keuangan di Kabupaten Bondowoso | 159
 - 6.2.1 *Basic Financial Literacy* di Kabupaten Bondowoso | 165
 - 6.2.2 *Advanced Financial Literacy* di Kabupaten

Bondowoso | 169

- 6.2.3 Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso | 172

Bab 7 POSISI STRATEGIS INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH | 185

- 7.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso | 185
 - 7.1.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember | 190
 - 7.1.2 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso | 194
 - 7.1.3 Strategi Inklusi Keuangan Lembaga Perbankan | 198

Bab 8 PENUTUP | 203

Daftar Pustaka | 207

Indeks | 220

Tentang Penulis | 222

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** Persentase kepemilikan rekening penduduk dewasa tahun 2017 | 13
- Gambar 1.2** Jumlah penduduk dewasa yang belum memiliki rekening tahun 2017 | 13
- Gambar 1.3** Persentase penetrasi layanan keuangan global | 14
- Gambar 1.4** Persentase penetrasi pembayaran digital | 15
- Gambar 1.5** Penetrasi layanan keuangan global berdasarkan gender | 16
- Gambar 1.6** Keterkaitan keuangan inklusif dan makroprudensial | 23
- Gambar 3.1** Perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi 2004-2013 di Indonesia (%) | 43
- Gambar 3.2** Komposisi aset lembaga keuangan di Indonesia | 46
- Gambar 3.3** Perkembangan jumlah bank umum di Indonesia | 47
- Gambar 3.4** Transmisi dana dalam sistem keuangan | 56
- Gambar 3.5** Karakteristik Sistem Keuangan Indonesia 2012 di Institusi Keuangan | 65
- Gambar 3.6** Karakteristik sistem keuangan Indonesia 2012 di pasar keuangan | 65
- Gambar 4.1** *Bank Led* Model | 70
- Gambar 4.2** *Telco Led* Model | 72
- Gambar 4.3** Layanan keuangan digital | 73
- Gambar 5.1** Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten Jember | 79
- Gambar 5.2** Distribusi pendapatan responden di Kabupaten Jember | 81
- Gambar 5.3** Jumlah tanggungan keluarga responden di Kabupaten Jember | 82
- Gambar 5.4** Komponen pengeluaran responden di Kabupaten Jember | 83
- Gambar 5.5** Komposisi tingkat pendidikan responden di Kabupaten Jember | 84
- Gambar 5.6** Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten Bondowoso | 85
- Gambar 5.7** Distribusi pendapatan responden di Kabupaten Bondowoso | 86
- Gambar 5.8** Jumlah tanggungan keluarga responden di Kabupaten Bondowoso | 87
- Gambar 5.9** Komponen pengeluaran responden di Kabupaten Bondowoso | 88
- Gambar 5.10** Komposisi tingkat pendidikan responden di Kabupaten Bondowoso | 89
- Gambar 5.11** Keengganan masyarakat mengakses perbankan di Kabupaten Jember | 92
- Gambar 5.12** Persepsi terhadap tingkat pelayanan bank di Kabupaten Jember | 93
- Gambar 5.13** Intensitas menabung masyarakat di Kabupaten Jember | 94
- Gambar 5.14** Intensitas checking rekening di Kabupaten Jember | 95
- Gambar 5.15** Intensitas Penarikan Tunai | 96
- Gambar 5.16** Intensitas Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM) | 97
- Gambar 5.17** Tujuan Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM) | 98
- Gambar 5.18** Masalah Penggunaan ATM | 99
- Gambar 5.19** Jenis Pengajuan Kredit Perbankan | 101



BAB I

KONSTELASI INKLUSI KEUANGAN GLOBAL

1.1 Pendahuluan

Pasca fenomena krisis keuangan global tahun 2008 yang dialami sebagian negara-negara di dunia, isu mengenai inklusi keuangan (*financial inclusion*) menjadi diskusi menarik dalam banyak forum internasional seperti G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), dan *Alliance for Financial Inclusion* (AFI). Hal ini mengingat fenomena krisis keuangan global memberikan pelajaran berharga bagi banyak negara dalam menjaga pentingnya stabilitas sistem keuangan untuk mencapai stabilitas makroekonomi.

Pada forum G20 yang diadakan pada tahun 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, terminologi inklusi keuangan menjadi salah satu topik kajian menarik kedepan. Topik tersebut diangkat didasarkan pada dampak krisis 2008 yang dialami oleh beberapa negara yang termasuk pada negara dengan kondisi pendapatan perkapita rendah, tinggal di

BAB 2

INKLUSI KEUANGAN DAN KOHESI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

Inklusi keuangan berkembang sebagai kritik terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif. Jasa keuangan dapat mendorong pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi investasi kesehatan, pendidikan, usaha, dan pengelolaan keuangan. World Bank melalui *The Commission on Growth and Development* (2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang fokus pada perluasan skala ekonomi, perluasan akses asset perekonomian dan pasar yang pada akhirnya menciptakan pemerataan peluang bagi generasi selanjutnya. Pertumbuhan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan (miskin) dapat terlibat dalam proses pembangunan (Samans *et al.*, 2015). Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok/kaum yang termarginalkan di dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan dianggap sebagai pertumbuhan yang pro-kemiskinan apabila masyarakat miskin diuntungkan yang tercermin dari beberapa ukuran kemiskinan yang disepakati secara luas (Ravallion & Chen, 2002). Terkait dengan realitas empiris ini mendapat rujukan berarti dari Kraay (2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan dikatakan pro-kemiskinan jika pendapatan dari masyarakat miskin tumbuh lebih cepat daripada pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Pencapaian pertumbuhan inklusif melalui pendalaman keuangan atau inklusi keuangan ditentukan oleh peran lembaga keuangan. Pasar dan institusi keuangan memiliki fungsi untuk mengurangi efek informasi asimetris dan biaya transaksi. Lembaga keuangan melalui perannya dapat membantu memobilisasi dana dan tabungan serta menyediakan layanan pembayaran yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa (Wang'oo, 2008). Selain itu, lembaga keuangan juga memproduksi dan memproses informasi tentang investor dan proyek investasi sehingga memungkinkan alokasi dana yang lebih efisien. Minimnya lembaga keuangan dan pasar yang efisien serta maju menyebabkan pendapatan dan standar hidup masyarakat mengarah pada pembangunan ekonomi yang rendah. Lembaga dan pasar keuangan yang bekerja dengan baik akan memberikan kesempatan bagi semua pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi terbaik dengan mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Wang'oo, 2008).

dapat memberi kemudahan untuk mengakses jasa keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer ke kredit dan asuransi (Hannig dan Jansen, 2010). Hal tersebut mewujudkan suatu proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk seluruh pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta (Sarma, *et al.*, 2008).

BAB 4

MODEL INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Perkembangan inklusi keuangan global yang sangat cepat didorong oleh perubahan percepatan dan inovasi teknologi khususnya media *mobile phone* sehingga menjadi lebih mudah terakses dan inklusif. Media komunikasi melalui *mobile phone* menjadi pilihan dalam menawarkan akses jasa keuangan pada masyarakat pada berbagai wilayah. Penetrasi *mobile phone* di dunia mencapai kurang lebih satu miliar orang namun di sisi lain sekitar 1,7 miliar pada tahun 2012 belum memanfaatkan lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan salah satu kendala dalam pengembangan inklusi keuangan adalah wilayah geografis tiap daerah yang berbeda-beda yang masih sulit terakses oleh layanan jasa keuangan.

Implementasi *financial inclusion* khususnya lembaga keuangan perbankan masih menghadapi beberapa kendala baik yang dihadapi oleh masyarakat dan lembaga keuangan perbankan. Bagi masyarakat, kendala yang dihadapi seperti tidak adanya bank di sekitar tempat tinggalnya atau

Secara spesifik, peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi prioritas terutama bagi individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat yaitu 1) memberikan pendidikan literasi keuangan untuk generasi yang akan datang melalui sistem pendidikan formal; 2) meningkatkan akses informasi dan instrumen serta sumberdaya pengelolaan keuangan; dan 3) mendorong peningkatan kualitas pemahaman keuangan melalui beragam program dan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adasme, Osvaldo., Majnoni, Giovanni., and Uribe, Myriam. 2006. Acces and Risk: Friend or Foes? *World Bank Policy Research Working Paper* 4003.
- Adewale, A.A. 2014. Financial Exclusion and Livelihood Assets Acquisition Among Muslim Households in Ilorin, Nigeria: A Structural Invariance Analysis. *International Journal of Economics, Management and Accounting* 22. No.2. Hal. 69-94
- Adnan, N. 2011. Measurement of Financial Development: A Fresh Approach. *Qatar: 8th International Conference on Islamic Economics and Finance*.
- Aguera, Philippe. 2015. Financial Inclusion, Growth and Poverty Reduction. *Eccas Regional Conference*. 23 Maret 2015. World Bank
- Alam B. and Sami S. 2017. Role of banks in financial inclusion in India. *Journal*. Voume 62, Issue 2, April- June 2017, Pages 644-656, available online at <http://www.science-direct.com/science/article/pii/S0186104217300104>
- Alejandro, Carlos F. Diaz. 1985. Good-Bye Financial Repression, Hello Financial Crash. *Working Paper* 24 August.
- Alliance for Financial Inclusion. 2011. G20 Principles for Innovative Financial Inclusion. Online access on <http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20Principles%20for%20Innovative%20Financial%20Inclusion%20-%20AFI%20brochure.pdf>

**Persimpangan Kohesi Sosial
dan Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan**

Buku ini merupakan lanjutan dari buku edisi pertama yang telah terbit dengan judul "Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model". Sub pokok bahasan pada buku kedua ini lebih menekankan pada urgensi inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi dengan beragam tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hal ini sejalan dengan dinamika teknologi informasi yang semakin tiada batas baik dalam dimensi ruang dan waktu. Tematik inklusi keuangan telah menjadi bahasan menarik dan telah menjadi bagian dari program utama pembangunan di hampir seluruh negara di dunia dalam upaya pendalaman sistem keuangan secara merata pada seluruh strata masyarakat. Begitu halnya di Indonesia, tantangan terbesar implementasi inklusi keuangan yang memiliki karakteristik dan kohesi sosial berbeda baik secara geografi, demografi sosiologi dan budaya. Secara khusus buku ini juga memberikan diskripsi inklusi dan literasi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru dalam pengembangan dan penguatan inklusi dan literasi keuangan khususnya di Indonesia.

